



Peranan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara

Herlan Lagantondo ^{a,1}, Rilfayanti Thomassawa ^{b,2}, Andris Tenggehi ^{c,3}

^{a, b, c} Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Sintuwu Maroso, Poso, Sulawesi Tengah, 94619

¹ herlanlagantondo5@gmail.com*, ² rilfayanti@unsimar.ac.id

*korespondensi penulis

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Riwayat Artikel: Diterima: 04-08-2021 Disetujui: 22-09-2021 Kata Kunci: Peranan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa	Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah desa dalam peningkatan pembangunan Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara, serta Faktor – Faktor apa yang mempengaruhinya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survei sebagai dasar dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi dengan melibatkan informan yang berkompeten dan bisa dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan serta penelusuran data atau dokumen – dokumen. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menjelaskan atau menggambarkan data yang diteliti atau di dapatkan dari lapangan, baik data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, maupun dari data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran pustaka dan dokumen dari berbagai sumber resmi. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peranan pemerintah desa dalam peningkatan pembangunan Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara masih kurang maksimal. Hal ini terlihat dalam ketiga indikator penelitian yang digunakan masih kurang dilaksanakan, adapun faktor yang mempengaruhi adalah rendahnya sumber daya manusia perangkat desa. Abstract: This study aims to find out the role of the village government in increasing the development of Saemba Village, Mori Atas Subdistrict, North Morowali Regency, and factors influence it. The research method used is survey research as the basis for the type of descriptive research. Data collection techniques are carried out using observation techniques, in-depth interviews and documentation by involving competent informants and can be considered to be able to provide the required information and search for data or documents. The data obtained were then analyzed qualitatively by explaining or describing the data studied or obtained from the field, both primary data obtained from interviews, secondary data obtained through library searches and documents from various official sources. The results of the research obtains that the role of the village government in increasing the development of Saemba Village, Mori Atas Subdistrict, North Morowali Regency is still less than optimal. It can be seen in the three research indicators used are still not implemented, while the influencing factor is the low of human resources of village officials



PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 9 bahwa: Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selajutnya dalam asas pengeleloaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa: pemerintah desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Selama ini, kebijakan pembangunan di Indonesia terutama

pembangunan Desa selalu bersifat top down dan sektoral dalam perencanaan serta implementasinya tidak terintegrasi, hal ini dapat dilihat dari program pemerintah pusat yaitu melalui setiap kementerian yang sifatnya sektoral.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar, dan terencana. Pada prinsipnya pembangunan bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat. Namun harus di sadari bahwa kemampuan Aparatur Pemerintah terutama dalam pelaksanaan tugasnya belum sepenuhnya memiliki kemampuan yang maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, yang tentunya sangat mempengaruhi kualitas dari pada aparatur pemerintah itu sendiri. Kantor desa sering kita jumpai sistem kerja yang berdasarkan hirarki, di mana pemimpin dalam hal ini adalah kepala desa, memberikan konsep-konsep dalam penentuan pelaksanaan pembangunan, yang tentunya harus diejawantahkan oleh para staf yang dibawahnya. apabila kemampuan dari staf yang ada masih dalam taraf yang rendah, maka dapat dipastikan akan terjadi kekeliruan dalam menganalisa apa yang dimaksudkan oleh pimpinannya.

Demikian pula halnya dengan peranan dari seorang kepala desa sebagai aparatur pemerintah yang ada di desa, apabila tidak mampu untuk mengimplementasikan serta menjabarkan keputusan-keputusan yang di ambil oleh perangkat yang ada di atasnya, maka akan terjadi kesalahpahaman dalam pembangunan terlebih khusus pelaksanaan pembangunan yang ada di desa yang dipimpinnya. Oleh karena itu peranan dari pemerintah desa sangat ditentukan kualitas sumber daya dari pemerintah yang tidak tanggap terhadap permasalahan yang ada di desa, akan menimbulkan kepincangan dalam penyelenggaraan pemerintahan apalagi dalam pelaksanaan pembangunan.

Kata peranan ini sebenarnya menunjukan pada aktivitas yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam suatu kelompok masyarakat. Apabila seorang tidak melakukan apa-apa dalam suatu kelompok tersebut maka ia tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai anggota dalam organisasi.

Secara etimologis kata peranan berasal dari kata peran yang artinya: Pemain sandiwara, tukang lawak. Kata “Peran” ini diberi akhiran “an” maka menjadi “peranan” yang artinya sesuatu yang memegang pimpinan terutama atau karena hal atau peristiwa, Poerwadarminta W.J.S. (1986:735). Dengan demikian kata peran berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena sesuatu hal atau peristiwa

(Bhattacaryya, dalam Betten 1998), mendefinisikan peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa adalah proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan wewenang pemerintah, yaitu untuk :

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat,
2. Mengintegrasikan kehidupan masyarakat desa, dan
3. Memungkinkan mereka untuk memberi sumbangan kepada kemajuan nasional.

Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 Tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa,
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan, dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepala desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara kesatuan Negara Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Melaksanakan kehidupan demokrasi.

Sebagai seorang pemimpin desa, kepala desa harus mampu bertindak sebagai pelayanan yang baik, jujur dan transparan, berwibawa yang didukung oleh sikap mental serta berperilaku terpuji yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan masyarakat dan keluarga. Dalam posisinya sebagai pemimpin formal kepala desa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan Pemerintahan Desa sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. (Gibson L.J, dkk, 1999 :24-26).

Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintah apabila memiliki wibawa maka segala yang dikehendakinya demi kepentingan pembangunan dapat diselenggarakan dengan baik, sebab kepala desa didengar dan dipatuhi oleh masyarakat, seperti kejujuran, kesederhanaan, keperkasaan, keuletan dan sebagainya maka kewibawaannya sebagai pemimpin pemerintahan akan dapat tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat yang dipimpinnya. (Soewito MD. SH 2007 : 180-182).

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa, Perangkat desa, BPD dan Kepala Dusun wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dalam lingkungan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing. (Drs. H. Surjadi, M.Si 2009: 7-8)

Pembangunan Desa adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan swadaya gotong royong. Pembangunan Desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan prakarsa dan meningkatkan keterampilan melalui bimbingan dan bantuan dari aparaturnya pemerintah sesuai dengan bidang dan besarnya masing-masing.

Dengan demikian berarti masyarakat desa diberi kesempatan secara langsung melalui swadaya gotong royong, untuk ikut bersama-sama dengan pemerintah, untuk membangun di Daerah Pedesaan. Dari segi lain materi definisi sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas mengandung makna, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa diperlukan adanya suatu Badan atau Instansi Pemerintah yang langsung menanganinya

Mengacu dari makna pembangunan yang sekaligus merupakan komitmen nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dicantumkan di atas, maka untuk mewujudkannya diperlukan peningkatan peranan dari aparaturnya pemerintah. Apalagi di era reformasi dewasa ini, sangat dirasakan adanya tuntutan yang semakin kompleks dari masyarakat terhadap kemampuan aparaturnya pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya perangkat pemerintah terlebih khusus pemerintah desa di mana tingkat keahlian dan pendidikannya masih rendah.

Pembangunan sarana dan prasarana yang ada di desa Saemba merupakan kepentingan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintah yang ada, demi mencapai suatu pembangunan yang baik untuk negara kita. Oleh karena itu perlu adanya pembangunan sarana dan prasarana dengan sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa Saemba.

Permasalahan yang dihadapi Desa Saemba sekarang ini seperti masyarakat kurang dilibatkan dalam proses perumusan program pembangunan desa, masih ada sarana dan prasarana pembangunan yang tidak disertakan dengan papan proyek dan tidak terselesaikan tepat waktu dan hubungan antara BPD dan Kepala Desa yang kurang harmonis sehingga berdampak pada pembangunan di desa, dan juga Badan Usaha Milik Desa yang tidak berkembang. Dari uraian masalah ini, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif Kualitatif. Dasar penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan serta mendapatkan informasi-informasi dan data-data yang ada di lokasi penelitian. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari informan penelitian dan dokumen – dokumen dari desa setempat. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, BPD sebanyak tiga orang, dan Tokoh Masyarakat sebanyak tujuh orang total berjumlah sebelas orang, sedangkan informan kunci dalam penelitian ini, adalah Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan di desa. Teknik pengumpulan data

yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dengan analisis model Miles and Huberman dalam Sugiyono (2011:334) dimana analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

- a. Reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pokoknya.
- b. Penyajian data. Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan organisasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan lainnya.
- c. Verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Verifikasi data dimulai sejak permulaan pengumpulan data sampai ditemukan bukti baru maka kesimpulan awal tersebut tidak berubah. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan sudah kredibel..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan pemerintah desa dalam peningkatan pembangunan Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara peneliti menggunakan indikator penelitian yang dikemukakan oleh (Bhattacharyya, dalam Betten 1998), mendefinisikan peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa adalah proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan wewenang pemerintah, yaitu untuk :

- a. Meningkatkan taraf hidup masyarakat, berarti pemerintah desa harus dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan desa yang merata dan berkeadilan.

Dalam menjawab indikator yang pertama diatas, peneliti melakukan wawancara dengan informan penelitian ketua BPD inisial YP, mengatakan bahwa :

.... sesuai dengan tugas dan tanggungjawab saya selaku ketua BPD desa Saemba selama ini pemerintah desa dalam melakukan pembangunan desa tidak merata, dan kurang dalam memikirkan program – program yang berhubungan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat. Pemerintah desa kurang memahami tugas dan fungsinya masing – masing dan tidak adanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Kepala Desa sehingga berdampak pembangunan di desa (Wawancara Tanggal 27 April 2020)

Untuk membandingkan informasi yang disampaikan oleh ketua BPD, maka saya melakukan lagi wawancara dengan Kepala Desa Saemba inisial SL, mengatakan :

.... pemerintah desa selama ini sudah berupaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan desa, tetapi memang selalu bertahap ... (Wawancara Tanggal 28 April 2020)

Selanjutnya untuk menambah informasi yang dibutuhkan peneliti melakukan lagi wawancara dengan informan tokoh perempuan berinisial KR, mengatakan bahwa :

.... dalam hal upaya pemerintah desa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat masing kurang, program pembangunan desa hanya lebih difokuskan kepada program – program fisik yang mendatangkan keuntungan semata (Wawancara Tanggal 28 April 2020)

Untuk lebih menambah informasi yang dibutuhkan, dilakukan wawancara dengan informan seorang tokoh agama berinisial ST, mengatakan bahwa :

.... kalau saya melihat selama ini dari segi ekonomi masyarakat desa saemba sudah meningkat, karena adanya perusahaan yang menyediakan lapangan kerja buat masyarakat. Tetapi khusus peranan pemerintah desa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat masih kurang (Wawancara Tanggal 27 April 2020)

Dari informasi yang disampaikan oleh informan diatas, dapat dikatakan bahwa pemerintah desa Saemba masing kurang dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

b. Mengintegrasikan kehidupan masyarakat desa, berarti pemerintah desa harus dapat menyatukan segenap potensi yang dimiliki oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan desa.

Untuk menjawab indikator kedua diatas, maka dilakukan wawancara dengan informan anggota BPD berinisial KA, mengatakan bahwa :

.... dari apa yang saya ketahui selama ini, pemerintah desa kurang memperhatikan potensi – potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa seperti dalam perencanaan pembangunan desa masyarakat kurang dilibatkan. Sehingga terkesan hanya apa yang menjadi keinginan kepala desa saja yang dominan dimasukan dalam program pembangunan desa (Wawancara Tanggal 29 April 2020)

Selanjutnya peneliti melakukan lagi wawancara dengan informan tokoh pemuda berinisial YS, mengatakan bahwa :

.... dari segi karang taruna atau kepenudaan, pemerintah desa kurang memperhatikan kebutuhan pemuda khususnya fasilitas yang diperlukan dalam upaya mengembangkan minat dan bakat negerasi muda masih sangat kurang diperhatikan(Wawancara Tanggal 30 April 2020)

Untuk lebih menambah pengetahuan, dilakukan wawancara dengan informan tokoh pemuda berinisial MS, mengatakan bahwa :

.... dari apa yang saya lihat selama ini, akibat kurang terbukanya kepala desa dalam setiap penyusunan program pembangunan membuat masyarakat kurang memahami apa yang menjadi program pembangunan yang ada di desa (Wawancara Tanggal 29 April 2020)

Dari paparan informasi diatas, dapat dikatakan bahwa usaha pemerintah desa Saemba dalam menyatukan segenap potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk meningkatkan pembangunan desa masih kurang.

c. Memungkinkan mereka untuk memberi sumbangan kepada kemajuan nasional, berarti pemerintah desa harus memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya menopang pembangunan nasional.

Untuk mengetahui indikator yang ketiga diatas apakah berjalan dengan baik atau tidak, peneliti melakukan wawancara dengan informan anggota BPD berinisial IS, mengatakan bahwa :

.... sebagai salah satu anggota BPD saya melihat bahwa selama ini pemerintah desa Saemba masih kurang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan program – program pembangunan desa. seringkali yang terjadi ada program pembangunan yang tidak dimusyawarahkan tetapi tiba – tiba sudah langsung dikerjakan sehingga membuat masyarakat bertanya – tanya (Wawancara Tanggal 4 Mei 2020)

Untuk menambah informasi yang dibutuhkan, maka dilakukan lagi wawancara dengan informan lain seorang tokoh adat berinisial MP, mengatakan bahwa :

.... selama ini saya melihat banyak anggota masyarakat desa Saemba yang memiliki kemampuan dan sumber daya yang handal, tetapi kurang mendapat perhatian dan kurang dilibatkan dalam pemerintahan desa (Wawancara Tanggal 5 Mei 2020)

Selanjutnya dilakukan lagi wawancara dengan informan seorang tokoh perempuan berinisial RL, mengatakan bahwa :

.... sebagai salah seorang tokoh perempuan di desa saya melihat bahwa pemerintah desa masih kurang melibatkan anggota masyarakat dalam musyawarah pembangunan desa (Wawancara Tanggal 4 Mei 2020)

Sesuai hasil wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa pemerintah desa Saemba kurang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya menopang pembangunan nasional.

Faktor – faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah desa dalam peningkatan pembangunan Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara

Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi diatas, peneliti melakukan wawancara dengan informan penelitian ketua BPD inisial YP, mengatakan bahwa :

.... sesuai dengan tugas dan tanggungjawab saya selaku ketua BPD desa Saemba salah satu faktor yang mempengaruhi adalah rendahnya sumber daya manusia perangkat desa yang ada. Sehingga berdampak pada minimnya pemahaman dan pengetahuan tentang tugas dan fungsi masing (Wawancara Tanggal 27 April 2020)

Selanjutnya untuk menambah informasi yang dibutuhkan, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan seorang tokoh pendidikan berinisial RG, mengatakan bahwa :

.... menurut saya faktor yang dominan mempengaruhi adalah sumber daya manusia dari perangkat desa dan kepala desa yang ada masih rendah, sehingga dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan desa menjadi kurang maksimal (Wawancara Tanggal 5 Mei 2020)

Sesuai hasil wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara adalah sumber daya manusia perangkat desa yang masih rendah.

PENUTUP

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah desa dalam peningkatan pembangunan Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara masih kurang maksimal. Hal ini terlihat dalam ketiga indikator penelitian yang digunakan masih kurang dilaksanakan. Faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Saemba Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara adalah rendahnya sumber daya manusia perangkat desa. Ada beberapa hal yang peneliti sarankan untuk dilakukan, yaitu :

1. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan di desa harus dapat mendorong perangkatnya untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi, dan mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan – pelatihan sehubungan dengan penguatan kapasitas mereka.
2. Kepala desa harus lebih banyak mengikutsertakan masyarakat desa dalam setiap perencanaan pembangunan desa, sehingga setiap program – program pembangunan yang ada dapat didukung oleh semua masyarakat desa

DAFTAR PUSTAKA

Dwipayana, AAGN. Ari. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta, IRE Press

Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Yarsif Watampone. Santoso, Purwo. 2003. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Siagian, Sondang. P. 1997. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Gunung Agung.

Sugiyono, Prof. Dr. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Penerbit Alfabeta.

Adisasmita, R. 2006. *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Membangun Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: Rineka Cipta

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001;849) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa